

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Prestasi manajemen merupakan suatu kesuksesan dalam meraih tujuan emiten. Pengukuran prestasi suatu emiten sangat memiliki tingkat urgensi yang tinggi sebab bisa dimanfaatkan untuk acuan dalam pengambilan keputusan oleh pihak eksternal dan internal. Performa/kinerja emiten adalah cerminan dari keadaan finansial emiten tersebut yang dapat diukur melalui berbagai alat analisis finansial sehingga keadaan finansial baik/buruk dapat digunakan untuk melihat prestasi kerja pada periode tertentu.

Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, bidang ekonomi juga ikut mengalami perubahan yang besar. Perkembangan ini menyebabkan perekonomian yang maju pesat, namun tidak sedikit pula perusahaan yang mengalami kesulitan karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain yang lebih maju. Akibat dari *financial distress*, sejumlah emiten di IDX mengalami *delisting* sebab tidak dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Contohnya, tahun 2015 PT. Davomas Abadi Tbk (DAVO) dan PT Unitex Tbk *delisting* dari IDX.. Indikasi terjadinya *financial distress* pada emiten yaitu peningkatan untuk mempertahankan likuiditas ketidakmampuan emiten untuk membayar liabilitas yang sudah digunakan untuk operasionalnya

Selain itu, *financial distress* juga dapat disebabkan oleh bertambahnya kerugian yang kontinyu, tidak lakunya barang yang sudah diproduksi, rusaknya aset oleh faktor alam, kurang tepatnya penerapan tata kelola perusahaan, dan krisis moneter. Berbagai factor tersebut bisa memberikan dampak yang besar pada keputusan para pemodal untuk berinvestasi pada emiten tersebut (Sulistyowati *et al.*, 2019).

Financial distress merupakan keadaan suatu emiten yang sedang mengalami penurunan kinerja finansial yang dapat diukur melalui struktur rasio finansial dan tata kelola perusahaan (Sulistyowati *et al.*, 2019). Menurut Fathonah (2016), *financial distress* adalah tahap turunnya keadaan finansial suatu emiten sebelum mengalami likuidasi/bangkrut. *Financial distress* dapat berdampak buruk pada *stakeholders* dan *shareholders*. Umumnya, *financial distress* disebabkan oleh berbagai faktor seperti penjualan merugi secara kontinyu, asset rusak karena bencana alam, tidak stabilnya kondisi ekonomi negara, atau kurang baiknya implementasi GCG (*Good Corporate Governance*).

Menurut *Organization for Economic Corporate and Development* (OECD), tata kelola perusahaan merupakan struktur yang dibuat untuk menentukan tujuan berdirinya suatu emiten, sarana untuk meraih tujuan emiten, dan sarana untuk mengawasi kinerja emiten (Durri, 2017). Di Indonesia, hanya 20% saja emiten yang baru menerapkan GCG dengan baik sehingga penerapannya masih sangat rendah (Diantari *et al.*, 2019). GCG belum dapat dilaksanakan sepenuhnya sehingga emiten belum dapat

merealisasikan berbagai prinsip yang terdapat dalam GCG secara baik dan benar. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai hambatan dalam pelaksanaannya (Nasiroh & Priyadi, 2018).

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pihak IDX terpaksa harus mendorong penerapan GCG dengan pemberian insentif berupa pemeriksaan pajak tidak dilakukan dalam 1 periode akuntansi dan mengurangi jumlah iuran bursa. Peningkatan yang terjadi pada implementasi GCG dapat menjadikan aktivitas *monitoring* bertambah baik sehingga kinerja emiten akan meningkat dan dapat menurunkan peluang *financial distress* (Diantari *et al.*, 2019). Penerapan GCG oleh emiten secara baik dan benar bisa menurunkan risiko kesulitan keuangan dimasa depan. Hal itu disebabkan semua strategi bisnis yang digunakan oleh manajemen akan benar-benar dikaji agar mengantisipasi *financial distress* pada periode akuntansi berikutnya (Nasiroh & Priyadi, 2018)

Permasalahan CCG sangatlah menarik perhatian jika dihubungkan dengan *financial distress* ketika krisis moneter 1997. Lemahnya penerapan GCG menjadi satu dari beberapa sumber utama penyebab buruknya kondisi ekonomi Asia (termasuk Indonesia). Contohnya, skandal kasus PT. Indofarma, Bank Lippo, dan PT. Kimia Farma. Oleh sebab itu, tata kelola perusahaan yang baik merupakan aspek yang harus diperbaiki khususnya dalam pengelolaan emiten. Pada riset ini *good corporate governance* menggunakan proksi ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris,

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran komite audit, dan komisaris independen.

Di Indonesia, kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Struktur kepengurusan perusahaan terdiri dari 2 unsur yaitu Dewan Direksi dan dewan komisaris yang memiliki peran sebagai *agent* dengan wewenang untuk mengelola operasional emiten dan menentukan kebijakan atas nama *principal*. Pada praktiknya, para *agent* tersebut tidak melakukan tindakan terbaik sebab adanya *conflict of interest* dengan para *principal*. Masalah tersebut dapat diminimalisasi dengan mengimplementasikan GCG (Diantari *et al.*, 2019).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2017) dan Masitoh (2019) memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara ukuran dewan direksi dengan *financial distress*. Sedangkan pada penelitian Helena & Saifi (2018) memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara ukuran dewan direksi dengan *financial distress*. Tetapi pada penelitian Durri (2017), Nasiroh & Priyadi (2018) memberikan kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh antara ukuran dewan direksi dengan *financial distress*.

Pada penelitian Masitoh (2019) memberikan kesimpulan jika ada pengaruh negatif antara ukuran dewan komisaris berpengaruh dengan *financial distress*. Sedangkan pada penelitian Sulistyowati *et al.*, (2019) memberikan kesimpulan jika ada pengaruh positif antara ukuran dewan komisaris berpengaruh dengan *financial distress*. Tetapi pada penelitian

Harahap (2017), Durri (2017), Nasiroh & Priyadi (2018), Diantari *et al.*, (2019) memberikan kesimpulan jika tidak ada pengaruh negatif antara ukuran dewan komisaris berpengaruh dengan *financial distress*.

Struktur kepemilikan adalah satu dari beberapa faktor yang bisa memengaruhi keadaan emiten pada periode akuntansi berikutnya. Kepemilikan manajerial dapat meminimalisasi munculnya permasalahan keagenan pada emiten. Kepemilikan manajerial adalah suatu perbandingan saham yang dimiliki oleh manajemen (komisaris atau direksi) dengan jumlah saham yang beredar. Peningkatan yang terjadi pada kepemilikan manajerial maka tanggung jawab manajemen juga akan semakin bertambah khususnya tanggung jawab atas pengelolaan operasional emiten. Pengambilan keputusan oleh manajemen diharapkan dapat berdampak baik bagi emiten sehingga dapat mengatasi terjadinya *financial distress* dikemudian hari (Diantari *et al.*, 2019).

Kepemilikan saham manajerial dapat menjadikan para manajer lebih termotivasi dan lebih giat dalam menghasilkan kinerja yang optimal bagi emiten sebab mereka juga berkepentingan dalam menghasilkan pendapatan mereka sendiri. Sedangkan kepemilikan institusional dapat meminimalisasi permasalahan keagenan karena pihak institusi dapat membantu aktivitas *monitoring* kinerja emiten sehingga manajemen tidak menghasilkan keputusan yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian bagi para *principal* (Harahap, 2017)

Pada penelitian Nasiroh & Priyadi (2018), Diantari *et al.*, (2019), memberikan kesimpulan bahwa ada pengaruh negatif antara kepemilikan manajerial dengan *financial distress*. Tetapi pada penelitian Fathonah (2016), Harahap (2017), Sulistyowati *et al.*, (2019), Sanny & Warastuti (2020), Hakim *et al.*, (2020) memberikan kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh antara kepemilikan manajerial dengan *financial distress*.

Pada penelitian Nasiroh & Priyadi (2018), Diantari *et al.*, (2019), Masitoh (2019), dan Sanny & Warastuti (2020) memberikan kesimpulan bahwa ada pengaruh negatif antara kepemilikan institusional dengan *financial distress*. Tetapi pada penelitian Fathonah (2016), Harahap (2017), Helena & Saifi (2018), Sulistyowati *et al.*, (2019), Sanny & Warastuti (2020), Hakim *et al.*, (2020) memberikan kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh antara kepemilikan institusional dengan *financial distress*.

Komite audit merupakan auditor internal yang dibentuk dewan komisaris, yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan pengendalian intern perusahaan (Nasiroh & Priyadi, 2018). Tugas komite audit yaitu membantu aktivitas *monitoring* yang dilakukan oleh dewan komisaris (Sulistyowati *et al.*, 2019). Komite audit mempunyai tugas untuk memberikan kepastian atas wajar tidaknya *financial report* sesuai dengan PABU; SPI perusahaan; *internal auditing* dan *external auditing* yang sesuai dengan standar audit yang berlaku dan pelaksanaan *follow up* dari hasil temuan audit oleh manajemen (Nasiroh & Priyadi, 2018).

Pada penelitian Masitoh (2019) memberikan kesimpulan jika ada pengaruh negatif komite audit dengan *financial distress*. Sedangkan pada penelitian Harahap (2017), Helena & Saifi (2018), Nasiroh & Priyadi (2018), dan Masitoh (2019) memberikan kesimpulan jika ada pengaruh positif komite audit dengan *financial distress*. Tetapi pada penelitian Fathonah (2016), Sulistyowati *et al.*, (2019) memberikan kesimpulan jika tidak ada pengaruh komite audit dengan *financial distress*.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Helena & Saifi, 2018). Komisaris independen mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting dalam menjadi wakil kepentingan pemilik saham yang tidak memihak siapapun. Komisaris independen harus ikut serta dalam pengawasan kinerja emiten, pemeriksaan untuk mengambil tindakan yang terkait dengan perilaku dan informasi pengelolaan keuangan; pertanggung jawaban atas ketaatan hukum bagi direksi dari semua kebijakan yang dibuatnya (Fathonah, 2016).

Pada penelitian Fathonah (2016), Diantari *et al.*, (2019) memberikan kesimpulan jika ada pengaruh negatif antara komisaris independen dengan *financial distress*. Tetapi pada penelitian Helena & Saifi (2018), Sanny & Warastuti (2020) memberikan kesimpulan jika tidak ada pengaruh antara komisaris independen dengan *financial distress*.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada tema yang serupa sebab struktur *good corporate governance*

sering kali memengaruhi kondisi *financial distress* yang dialami emiten. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Struktur *Good Corporate Governance* terhadap *Financial Distress*”.**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat pada riset ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap *financial distress* ?
2. Bagaimana pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *financial distress* ?
3. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *financial distress* ?
4. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Instutional terhadap *financial distress* ?
5. Bagaimana pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *financial distress* ?
6. Bagaimana pengaruh Komisaris Independen terhadap *financial distress* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis :

1. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap *financial distress*.
2. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *financial distress*.
3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *financial distress*.
4. Pengaruh Kepemilikan Instutional terhadap *financial distress*.
5. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *financial distress*.
6. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *financial distress*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Harapan dari riset ini adalah dapat dijadikan referensi bagi peneliti mendatang, terutama mengenai struktur *good corporate governance* dan kinerja keuangan terhadap *financial distress*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan serta kontribusi sebagai berikut :

a. Bagi Perusahaan

Mampu memberikan pemahaman atas keadaan yang tengah dihadapi perusahaan dan membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan.

b. Bagi Investor

Dapat memberikan informasi mengenai keadaan finansial perusahaan yang dapat membantu proses pengambilan keputusan khususnya tentang dimana dan kapan mereka akan berinvestasi pada suatu perusahaan.

c. Bagi Kreditur

Dapat dijadikan dalam proses penilaian kredit, apakah suatu perusahaan layak untuk mendapatkan pinjaman dengan kondisi yang sedang dialami.